

**DINAMIKA PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA: ANALISIS
MENGUNAKAN *GENERALIZED METHOD OF MOMENTS* (GMM)**

(Skripsi)

Oleh:

**AYUNDA RAHMANITA AHMAD
NPM 2211021032**



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**DINAMIKA PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA: ANALISIS
MENGUNAKAN *GENERALIZED METHOD OF MOMENTS* (GMM)**

Oleh

AYUNDA RAHMANITA AHMAD

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

DINAMIKA PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA: ANALISIS FAKTOR MAKRO EKONOMI MENGGUNAKAN *GENERALIZED METHOD OF MOMENTS* (GMM)

OLEH

AYUNDA RAHMANITA AHMAD

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, upah minimum provinsi (UMP), dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2018–2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah data panel dinamis dengan bantuan software Stata 17, serta metode estimasi *One-Step Difference Generalized Method of Moments* (GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sedangkan upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan. Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kebijakan upah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif perlu dioptimalkan untuk menekan pengangguran, sementara inflasi bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja serta penetapan upah yang seimbang antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha.

Kata Kunci: Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, Pertumbuhan Ekonomi, *Generalized Method Of Moments* (GMM)

ABSTRACT

THE DYNAMICS OF OPEN UNEMPLOYMENT IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF MACROECONOMIC FACTORS USING THE GENERALIZED METHOD OF MOMENTS (GMM)

By

AYUNDA RAHMANITA AHMAD

This study aims to analyze the effect of inflation, provincial minimum wage (UMP), and economic growth on the open unemployment rate in all provinces in Indonesia during the period 2018–2023. This study uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) with a quantitative approach. The analysis technique used is dynamic panel data with the help of Stata 17 software and the One-Step Difference Generalized Method of Moments (GMM) estimation method. The results show that inflation does not have a significant partial effect on the open unemployment rate, while the provincial minimum wage and economic growth have a significant effect. Simultaneously, all variables have a significant effect on the open unemployment rate. The conclusion of this study is that inclusive wage and economic growth policies need to be optimized to reduce unemployment, while inflation is not a major factor affecting the unemployment rate in Indonesia. Therefore, the government is advised to formulate more effective employment policies by focusing on improving the quality of economic growth that is capable of absorbing labor and setting wages that balance the welfare of workers and the capabilities of the business world.

Keywords: Open Unemployment Rate, Inflation, Provincial Minimum Wage, Economic Growth, Generalized Method Of Moments (GMM)

Judul Skripsi

: **DINAMIKA PENGANGGURAN TERBUKA DI
INDONESIA: ANALISIS FAKTOR MAKRO
EKONOMI MENGGUNAKAN *GENERALIZED
METHOD OF MOMENTS (GMM)***

Nama Mahasiswa

: ***Ayunda Rahmanita Ahmad***

Nomor Induk Mahasiswa

: **2211021032**

Program Studi

: **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. **Komis Pembimbing**

Prayudha Ananta, S.E., M.Si.
NIP. 198809162014041001

MENGETAHUI

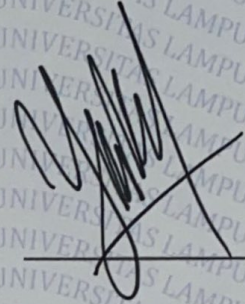
2. **Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.
NIP. 198007052006042002

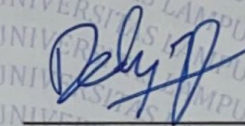
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

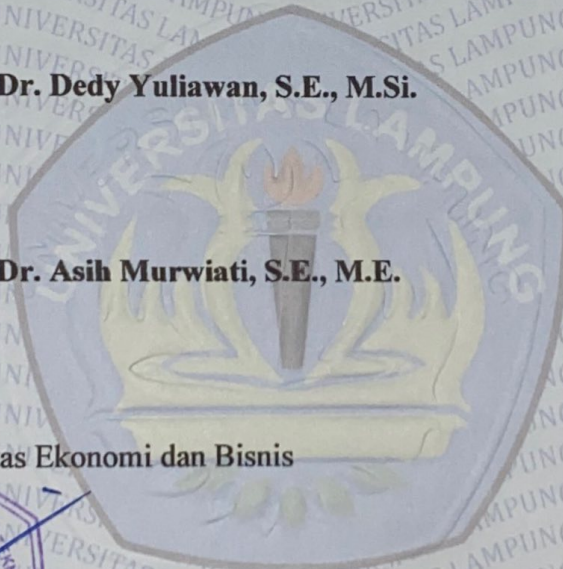
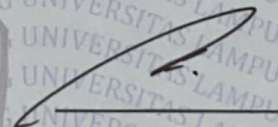
Ketua : Prayudha Ananta, S.E., M.Si.



Penguji I : Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.



Penguji II : Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 4 Maret 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayunda Rahmanita Ahmad

NPM : 2211021032

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Dinamika Pengangguran Terbuka di Indonesia: Analisis Menggunakan *Generalized Method of Moments* (GMM)” telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 April 2026
Yang membuat pernyataan,



Ayunda Rahmanita Ahmad

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ayunda Rahmanita Ahmad, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Oktober 2005. Penulis merupakan anak perempuan pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Mas Ahmad dan Ibu Anita. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2009–2010 di PAUD Titah Bunda. Selanjutnya, pada tahun 2010–2016 penulis menempuh pendidikan di Madrasah Masyariqul Anwar. Kemudian, pada tahun 2016–2019 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 25 Bandar Lampung. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan dinyatakan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti organisasi, di antaranya Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai staf Bidang Seni, Kreativitas, Publikasi, dan Dokumentasi periode 2023. Selain itu, penulis juga telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2025 selama kurang lebih 40 hari di Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Rum: 60)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang
menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaan
mu sebagai manusia”

(Baskara Putra - Hindia)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan, karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, doa yang tidak pernah terputus, serta pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Keyakinan dan dukungan yang diberikan membuat penulis percaya bahwa setiap mimpi dapat diraih melalui usaha dan keteguhan. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa doa dan restu yang selalu menyertai. Terima kasih karena selalu menjadi sumber kekuatan, penyemangat, dan alasan bagi penulis untuk terus melangkah serta bertahan hingga saat ini.

Kakek dan neneku tercinta

Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, serta nasihat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis.

Serta,

Almamater tercinta

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil alamin puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul “*Dinamika Pengangguran Terbuka di Indonesia: Analisis Faktor Makroekonomi Menggunakan Generalized Method of Moments (GMM)*” dan disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr Ida Budiarty, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritik, serta saran yang sangat berharga kepada penulis. Terima kasih atas ilmu,

motivasi, dan dukungan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Deddy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan arahan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang sangat berharga bagi penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
10. Kedua orang tuaku tercinta, atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tiada henti, serta pengorbanan tanpa pamrih yang diberikan dengan penuh keikhlasan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas dukungan moral maupun materi, apresiasi terhadap setiap usaha penulis, serta karena tidak pernah menuntut untuk selalu sempurna. Nasihat, motivasi, dan perhatian yang senantiasa diberikan menjadi kekuatan bagi penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
11. Kedua adikku tersayang, Silvia Oktarianti dan Muhammad Fardan, terima kasih karena selalu menjadi sumber semangat dan tempat berbagi dalam setiap langkah kehidupan penulis.
12. Kakek dan nenekku tercinta, yang sejak kecil telah memberikan kasih sayang, doa, dan perhatian dengan penuh ketulusan. Terima kasih atas dukungan yang tidak pernah pudar serta kasih yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup penulis. Kehadiran dan doa kalian menjadi kekuatan yang berarti hingga penulis dapat berada di titik ini.
13. Alm. datu dan alm. nenekku tercinta, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan nasihat yang telah diberikan, yang senantiasa akan penulis kenang sepanjang hidup.
14. Kepada seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan yang senantiasa diberikan, yang sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

15. Sahabat sejak awal perkuliahan, Tria, Nisa, dan Gizka, terima kasih telah menjadi teman terbaik dan menemani penulis selama perjalanan perkuliahan. Terima kasih atas segala kebaikan, bantuan, serta dukungan yang senantiasa kalian berikan.
16. Kelompok belajar “Evapro Members”, Tria, Nabila, Wulan, dan Siska, terima kasih atas dukungan, perhatian, dan hiburan yang berarti selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
17. Sahabatku Anika, terima kasih telah menemani penulis selama perkuliahan, memberikan dukungan, menjadi tempat bercerita, serta dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini.
18. Sahabat-sahabatku di bangku SMA, Elma, Rahma, Risha, Ika, Rani, dan Bila, terima kasih telah mewarnai masa sekolah penulis dan tetap memberikan dukungan, doa, kebaikan, serta hiburan yang berarti hingga penyusunan skripsi.
19. Teman-teman satu bimbingan “Pak Yudha” Sabil, Retno, Sonia, Indri, Nabila, Thia, Intan, Biya, Febby, Adlina, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang saling diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
20. Teman-teman KKN Desa Sinar Banten Tahun 2025, Rachel, Agnes, Nony, Richo, Alka, dan Fadhil, terima kasih telah menjadi bagian dari salah satu pengalaman paling menyenangkan dalam kehidupan perkuliahan penulis. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan kenangan yang tak terlupakan selama penulis menjalani KKN.
21. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan perjuangan yang telah dilalui bersama sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan. Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 16 Februari 2026

Penulis

Ayunda Rahmanita Ahmad

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teoritis	14
2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	14
2.1.2 Inflasi.....	17
2.1.3 Upah Minimum Provinsi (UMP).....	20
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	27
2.2 Keterkaitan Antar Variabel	29
2.2.1 Hubungan Inflasi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka	29
2.2.2 Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	29
2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	30
2.3 Studi Empiris	31
2.3 Kerangka Pemikiran.....	33
2.4 Rumusan Hipotesis	34

III. METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	36
3.4 Metode Analisis Data.....	37
3.5 Uji Diagnosa	38
3.6 Uji Stasioneritas (<i>Unit Root Test</i>).....	40
3.6 Uji Validitas Instrumen.....	41
3.7 <i>Generalized Method of Moment</i> (GMM).....	43
3.8 Uji Hipotesis	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	47
4.2 Pemilihan Model Panel Data	49
4.3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model.....	51
4.4 Uji Diagnosa	52
4.4.1 Uji Normalitas	53
4.4.2 Uji Multikolinearitas	53
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	54
4.4.4 Uji Autokorelasi	55
4.5 Hasil Uji Stasioneritas (<i>Unit Root Test</i>).....	56
4.6 Hasil Estimasi One Step Difference GMM	57
4.7 Uji Validitas Instrumen (GMM).....	59
4.7.1 Uji Hansen.....	59
4.7.2 Uji Arellano-Bond.....	60
4.8 Uji Hipotesis	61
4.8.1 Uji Parsial (Uji Z)	61
4.8.2 Uji Wald.....	62
4.9 Pembahasan Penelitian.....	63
4.9.1 Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	63
4.9.2 Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	65

4.9.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	67
V. KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	31
2. Variabel, Simbol, Satuan dan Sumber Data.....	35
3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	47
4. Hasil Uji Chow.....	50
5. Hasil Uji Hausman	50
6. Hasil Uji FEM.....	51
7. Hasil Uji Normalitas	53
8. Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
9. Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
10. Hasil Uji Autokorelasi	55
11. Hasil Uji Stasioneritas.....	56
12. Hasil Estimasi One-Step Difference GMM	58
13. Hasil Uji Hansen	60
14. Hasil Uji Arellano-Bond	60
15. Hasil Uji z-statistik.....	61
16. Hasil Uji Wald.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Tahun 2010-2023 (Persen).....	2
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen).....	3
3. Tingkat Inflasi Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen)	5
4. Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023 (Rupiah)	8
5. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen)	10
6. Kurva Phillips	19
7. Kurva Permintaan Tenaga Kerja Jangka Pendek	24
8. Kurva Penawaran Tenaga Kerja	26
9. Kerangka Pemikiran.....	33
10. Tahapan Analisis Data	38
11. Pergeseran Kurva Permintaan Tenaga Kerja akibat Kenaikan Upah Minimum.....	66
12. Perkembangan PMDN, PMA, dan TPAK di Indonesia (2018-2023)	68

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan kondisi ketika individu yang tergolong dalam angkatan kerja memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja, namun belum memperoleh kesempatan kerja (Ginting, 2021). Pengangguran berdampak pada hilangnya pendapatan individu, menurunkan pendapatan agregat masyarakat, mengurangi tingkat konsumsi, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran dapat menimbulkan persoalan sosial, seperti meningkatnya kriminalitas (Lamatenggo et al., 2019). Tingkat pengangguran yang tinggi juga akan mengurangi total output nasional dan memperbesar beban sosial-ekonomi yang harus ditanggung negara (Ahmad, 2024).

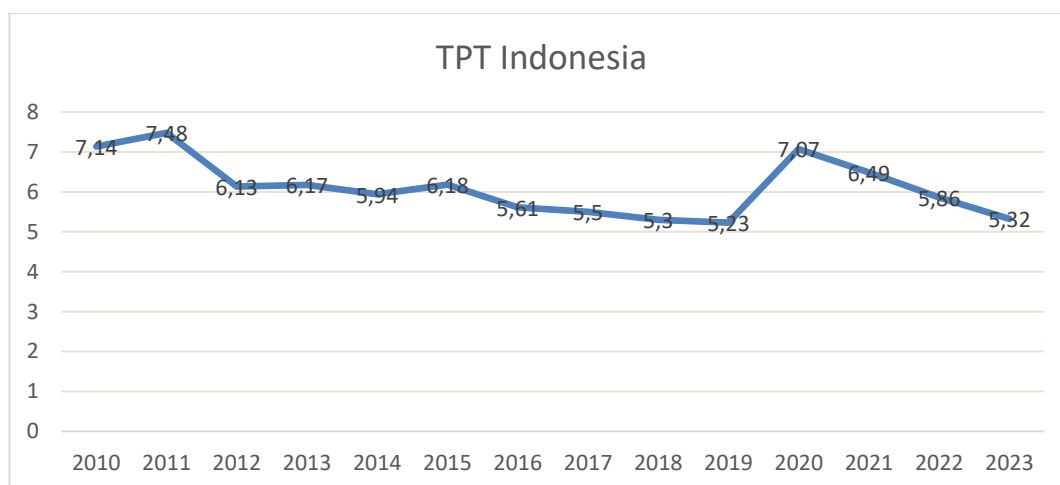
Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyediakan lapangan kerja yang layak bagi lebih dari 144 juta pekerja (BPS, 2023). Di tengah transformasi struktur ekonomi dan puncak bonus demografi, kemampuan negara menyerap angkatan kerja menjadi faktor krusial bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang. Namun, pertumbuhan ekonomi yang ada belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang merata bagi seluruh kelompok Masyarakat (Nurhapsari, 2022).

Masalah pengangguran di Indonesia tidak hanya mencerminkan ketidakefisienan pasar tenaga kerja, tetapi juga berkaitan dengan berbagai faktor struktural dan ekonomi. Pertumbuhan angkatan kerja yang pesat tanpa diiringi penciptaan lapangan kerja yang memadai menjadi salah satu penyebab utama (Qamariyah et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran

memerlukan penanganan yang komprehensif serta didukung oleh kebijakan ekonomi yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan.

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kondisi pengangguran di Indonesia adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Indikator ini mencerminkan proporsi individu yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya. TPT banyak digunakan dalam analisis ketenagakerjaan karena memberikan gambaran mengenai sejauh mana pasar kerja mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia. Angka TPT yang tinggi menunjukkan rendahnya daya serap pasar kerja dan menjadi sinyal bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan guna memperluas kesempatan kerja secara merata.

Untuk memahami perkembangan TPT secara lebih konkret, berikut disajikan data TPT nasional Indonesia selama periode 2010 hingga 2023.



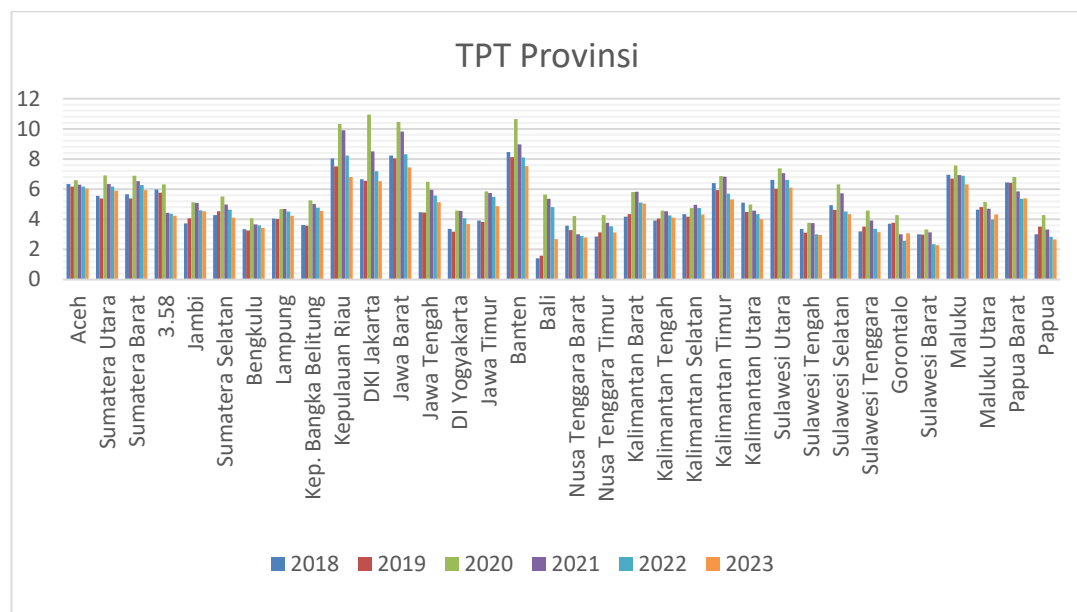
Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Tahun 2010-2023 (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024, (data diolah)

Gambar 1 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia selama periode 2010–2023 mengalami fluktuasi dan belum sepenuhnya berada pada kondisi yang stabil. Pada awal periode, TPT tercatat sebesar 7,14 persen pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 7,48 persen pada tahun 2011. Selanjutnya, TPT cenderung menurun secara bertahap hingga mencapai 5,23 persen pada tahun 2019.

Namun, pada tahun 2020 terjadi lonjakan signifikan menjadi 7,07 persen akibat pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi dan meningkatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Meskipun setelahnya TPT kembali menurun hingga 5,32 persen pada tahun 2023, angkanya masih berada di atas 5 persen.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa pengangguran masih menjadi isu penting secara nasional. Fluktuasi TPT mengindikasikan adanya faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi perubahannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan data panel tingkat provinsi sebagai unit observasi.



Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024, (data diolah)

Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menunjukkan variasi antarprovinsi serta perubahan dari waktu ke waktu. Pada periode sebelum pandemi (2018–2019), sebagian besar provinsi menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif stabil, meskipun terdapat perbedaan tingkat yang mencerminkan kondisi pasar kerja dan struktur ekonomi yang berbeda.

Memasuki tahun 2020, hampir seluruh provinsi mengalami peningkatan TPT yang cukup signifikan. Lonjakan ini terjadi sebagai dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, pembatasan mobilitas, serta penurunan produksi di berbagai sektor. Banyak perusahaan melakukan efisiensi dan pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga jumlah pengangguran meningkat secara luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa guncangan ekonomi nasional berdampak langsung terhadap pasar tenaga kerja di tingkat provinsi.

Pada periode 2021–2023, TPT di sebagian besar provinsi mulai mengalami penurunan seiring dengan pemulihan ekonomi dan membaiknya aktivitas usaha. Namun demikian, tingkat pengangguran di beberapa provinsi masih relatif lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi, yang menunjukkan bahwa proses pemulihan pasar kerja membutuhkan waktu dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ada.

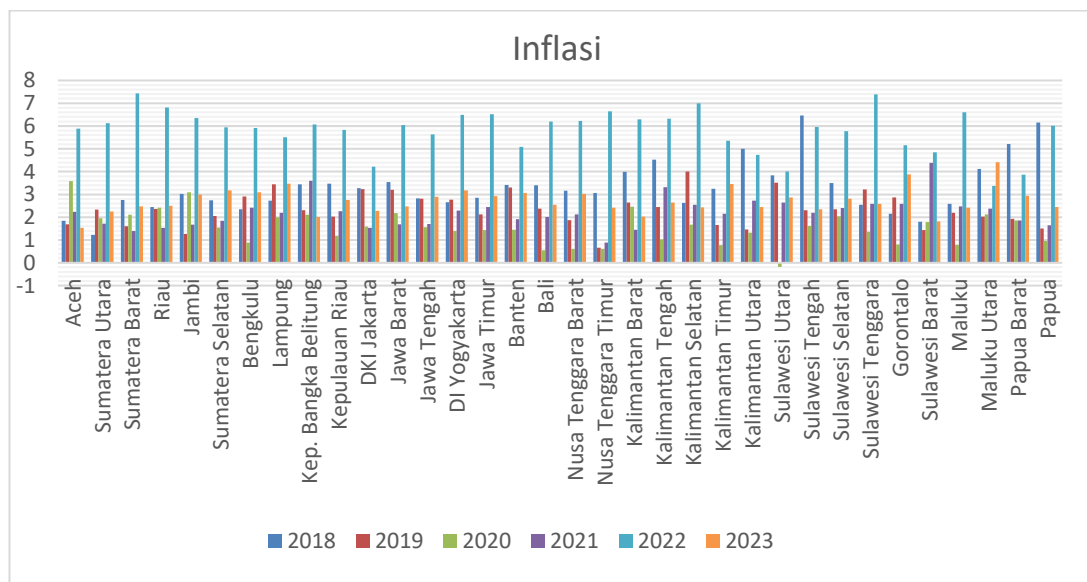
Perbedaan tingkat pengangguran tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, seperti fluktuasi inflasi yang memengaruhi daya beli dan biaya produksi, penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berdampak pada struktur biaya tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang menentukan kapasitas penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menguji bagaimana variabel-variabel makroekonomi tersebut memengaruhi tingkat pengangguran terbuka.

Salah satu faktor yang secara teoretis berkaitan dengan tingkat pengangguran adalah inflasi. Sukirno (2010) mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Perubahan harga yang signifikan berdampak pada daya beli masyarakat maupun biaya produksi perusahaan. Inflasi yang tinggi berpotensi menurunkan konsumsi dan mendorong perusahaan mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Sebaliknya, inflasi yang rendah atau terlalu rendah dapat mencerminkan lemahnya permintaan agregat, yang pada akhirnya juga memengaruhi tingkat pengangguran terbuka (Aprilia, 2022).

Inflasi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang signifikan, seperti yang dijelaskan oleh teori A.W. Phillips (1958), Teori ini menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara keduanya. Ketika inflasi meningkat, pengangguran cenderung menurun karena meningkatnya permintaan agregat, dan sebaliknya, penurunan inflasi dapat memicu peningkatan pengangguran akibat melemahnya aktivitas ekonomi.

Soeharjoto & Oktavia (2021), menemukan bahwa inflasi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Sebaliknya, hasil penelitian Hutagalung et al. (2024), menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dari tahun 2000-2021. Ini berarti bahwa seiring kenaikan inflasi, tingkat pengangguran terbuka juga meningkat. Namun, penelitian Diyanti (2022), menunjukkan hasil yang berbeda, di mana inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa kenaikan inflasi tidak selalu menyebabkan penurunan pengangguran yang sesuai.

Untuk memperoleh gambaran lebih lanjut mengenai dinamika inflasi secara regional, Gambar 3 menyajikan perkembangan tingkat inflasi di seluruh provinsi Indonesia selama periode 2018–2023.



Gambar 3. Tingkat Inflasi Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024, (data diolah)

Gambar 3 menunjukkan bahwa tingkat inflasi antarprovinsi di Indonesia selama periode 2018–2023 mengalami variasi yang cukup jelas. Perbedaan tersebut terlihat dari adanya provinsi dengan tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain pada tahun yang sama, sehingga menandakan bahwa tekanan kenaikan harga tidak terjadi secara seragam di seluruh wilayah.

Tahun 2022 menjadi periode ketika tekanan inflasi meningkat di banyak daerah secara bersamaan, yang terlihat dari kenaikan angka inflasi di sebagian besar provinsi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergerakan inflasi dipengaruhi tidak hanya oleh faktor regional, tetapi juga oleh faktor nasional yang berdampak luas terhadap harga. Grafik ini juga memperlihatkan bahwa setiap provinsi memiliki pola pergerakan yang tidak sepenuhnya sama, yang mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi daerah dalam merespons perubahan harga. Variasi inflasi antarwilayah tersebut penting diperhatikan karena dapat menimbulkan dampak yang berbeda terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi di masing-masing provinsi.

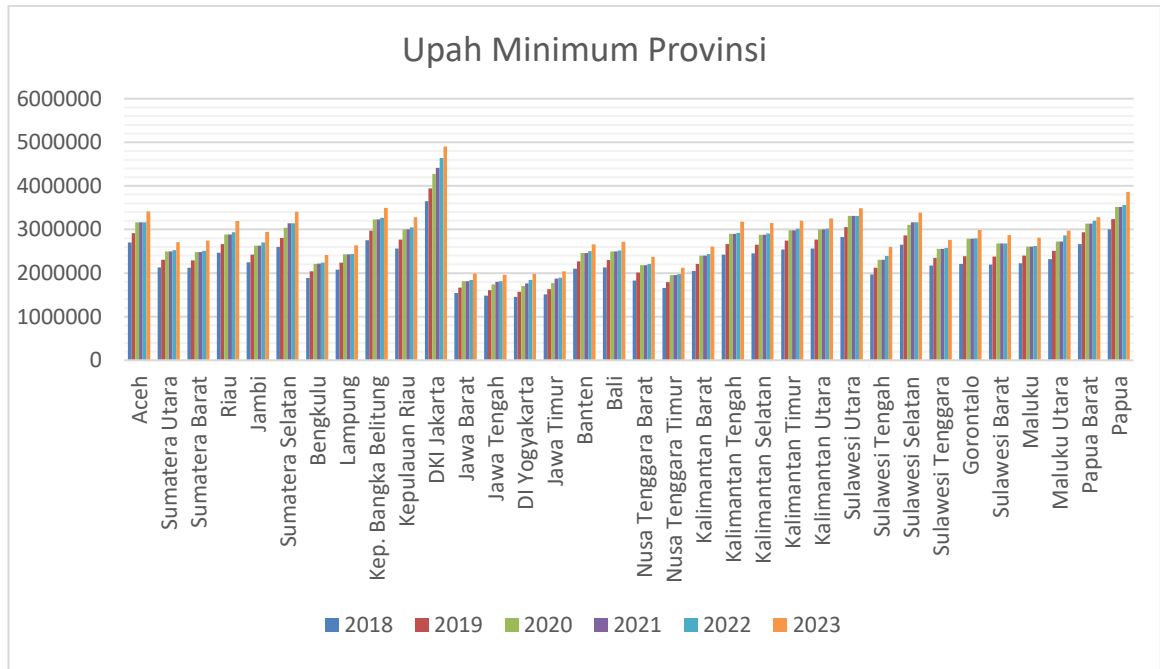
Selain itu, kondisi pasar tenaga kerja juga dipengaruhi oleh kebijakan pengupahan yang berlaku di setiap wilayah. Dalam hal ini, salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah batas upah minimum yang ditetapkan dan berlaku untuk semua kabupaten/kota di dalam satu provinsi. Berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021, penentuan UMP ditetapkan gubernur tiap tahun dengan mengacu pada komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta dengan mempertimbangkan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi daerah. KHL dihitung berdasarkan kebutuhan dasar pekerja dalam memenuhi konsumsi energi 2.100 kkal per hari dan berbagai kebutuhan lain, misalnya tempat tinggal, pendidikan, dan pakaian (UU Republik Indonesia Nomor 13, 2003).

Di Indonesia, setiap provinsi menetapkan UMP yang berbeda-beda. Berdasarkan data tahun 2023, rata-rata UMP nasional adalah sekitar Rp 2.923.309 per bulan. Sejumlah provinsi menetapkan UMP di bawah rata-rata tersebut, termasuk beberapa provinsi di Pulau Jawa, kecuali DKI Jakarta yang secara konsisten menetapkan UMP tertinggi. Besaran UMP di suatu wilayah dapat berdampak

positif maupun negatif terhadap kondisi ketenagakerjaan. UMP yang tinggi dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bekerja karena imbalan yang lebih layak, sehingga berpotensi menurunkan tingkat pengangguran. Sebaliknya, UMP yang rendah bisa menurunkan motivasi kerja karena dianggap tidak mencukupi kebutuhan dasar hidup (Khoirul Lisa, 2023).

Sejumlah studi juga menunjukkan temuan yang beragam terkait pengaruh UMP terhadap tingkat pengangguran. Irawati et al. (2019), menemukan bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT di Jawa Tengah. Sebaliknya, Simbolon et al. (2023), menemukan pengaruh positif dan signifikan, mengindikasikan bahwa kenaikan UMP bisa menjadi beban bagi perusahaan yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, Hartanto & Masjkuri (2017), menyatakan bahwa UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Jawa Timur, karena adanya kekakuan upah akibat intervensi pemerintah dan tekanan dari serikat pekerja.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan upah minimum di berbagai daerah, berikut disajikan grafik perkembangan UMP di tingkat provinsi selama periode 2018-2023. Grafik ini menggambarkan perbedaan nominal UMP antarprovinsi yang mencerminkan variasi kondisi ekonomi dan biaya hidup masing-masing wilayah.



Gambar 4. Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023 (Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024, (data diolah)

Gambar 4 menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh provinsi Indonesia pada periode 2018–2023 secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun besarnya berbeda antarwilayah. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan UMP tertinggi selama periode tersebut, sedangkan beberapa provinsi seperti Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada kelompok UMP yang relatif lebih rendah. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan tingkat penetapan upah minimum antarprovinsi.

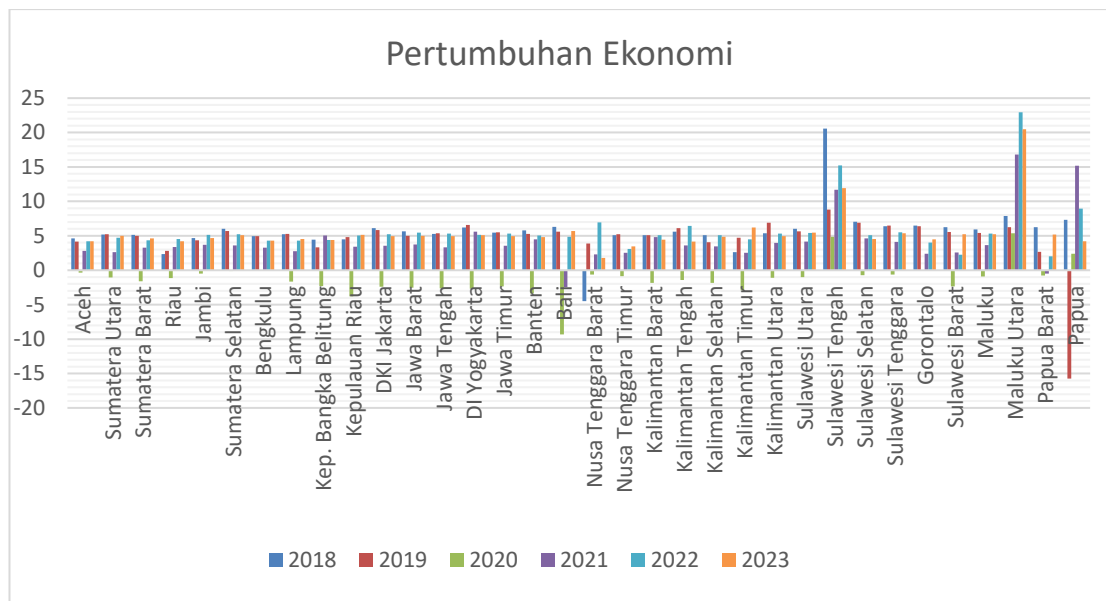
Selain itu, pada periode pandemi, terutama sekitar tahun 2021, terlihat bahwa kenaikan UMP di sejumlah daerah cenderung lebih terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan UMP tidak hanya mengikuti tren kenaikan tahunan, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi pada periode tertentu. Dengan demikian, grafik ini menggambarkan bahwa kebijakan upah minimum di Indonesia bersifat dinamis dan bervariasi antarwilayah serta antarwaktu.

Selain inflasi dan upah minimum, faktor makroekonomi lain yang turut berperan dalam memengaruhi dinamika pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas penghasilan barang dan penyediaan jasa di suatu daerah, yang berkaitan langsung dengan kemampuan perekonomian dalam menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, variabel ini penting dianalisis dalam hubungannya dengan perubahan tingkat pengangguran terbuka.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan bertambahnya kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu (Mankiw, 2016). Secara teori, peningkatan aktivitas produksi akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, sehingga berpotensi menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini sejalan dengan hukum Okun (1962) yang menyatakan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Ketika perekonomian tumbuh, aktivitas produksi barang dan jasa meningkat, sehingga permintaan terhadap tenaga kerja juga bertambah. Kondisi ini membuka lebih banyak kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka pengangguran (Khairunnisa, 2022). Penelitian oleh Hadi et al. (2022) mendukung teori tersebut dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.

Namun demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak selalu berjalan konsisten. Leasiwal et al. (2022) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pengangguran. Kondisi ini dapat terjadi ketika pertumbuhan ekonomi lebih dipicu oleh sektor-sektor padat modal atau peningkatan produktivitas, sehingga output meningkat tanpa diikuti penyerapan tenaga kerja yang sebanding. Sementara itu, penelitian Irawati et al. (2019) di Jawa Tengah periode 2003–2018 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menurunkan pengangguran apabila struktur ekonomi, kualitas tenaga kerja, dan karakter investasi tidak mendukung penciptaan lapangan kerja secara luas.

Di Indonesia, dinamika pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan pengangguran dari tahun ke tahun. Meskipun secara umum peningkatan aktivitas ekonomi berpotensi mendorong penyerapan tenaga kerja, dampaknya sangat bergantung pada struktur ekonomi daerah, sektor yang tumbuh, serta karakteristik pasar tenaga kerja. Variasi pertumbuhan ekonomi antarprovinsi di Indonesia periode 2018–2023 dapat diamati pada Gambar 5.



Gambar 5. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023 (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024, (data diolah)

Gambar 5 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia selama periode 2018–2023 mengalami dinamika yang beragam. Sebagian besar provinsi mencatat pertumbuhan positif, namun pada tahun 2020 banyak daerah mengalami perlambatan bahkan kontraksi akibat dampak pandemi COVID-19. Pada periode 2021–2023 terlihat adanya pemulihan ekonomi di berbagai wilayah, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda antarprovinsi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi daerah berlangsung secara tidak seragam. Variasi pertumbuhan tersebut penting diperhatikan karena pertumbuhan ekonomi berpotensi memengaruhi penyerapan tenaga kerja, sehingga menjadi salah satu faktor yang relevan dalam analisis tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan uraian mengenai dinamika tingkat pengangguran terbuka serta keterkaitannya dengan inflasi, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi. Kondisi ini mencerminkan bahwa tekanan ekonomi dan kemampuan penciptaan lapangan kerja belum berjalan secara optimal.

Meskipun pengangguran telah lama menjadi isu penting, tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih menunjukkan fluktuasi dan belum sepenuhnya stabil. Selain itu, tidak semua variabel makroekonomi memberikan pengaruh yang sama terhadap pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel makroekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menunjukkan dinamika yang berbeda antarprovinsi dan dari waktu ke waktu. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan pengangguran bukan sekadar persoalan jumlah angkatan kerja, tetapi berkaitan erat dengan kondisi makroekonomi yang memengaruhi aktivitas produksi dan penciptaan kesempatan kerja. Fluktuasi inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat serta biaya produksi, yang pada akhirnya berdampak pada keputusan perusahaan dalam memperluas atau mengurangi tenaga kerja. Di sisi lain, kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terus mengalami penyesuaian setiap tahun berpotensi memengaruhi struktur biaya tenaga kerja dan respons perusahaan dalam menyerap tenaga kerja. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan peningkatan output tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja apabila pertumbuhan tersebut tidak bersifat padat karya.

Perbedaan pergerakan inflasi, UMP, dan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan kemampuan penciptaan lapangan kerja di Indonesia tidak berlangsung secara seragam. Kondisi ini menimbulkan

kesenjangan tingkat pengangguran antarwilayah serta mengindikasikan adanya keterkaitan antara dinamika variabel makroekonomi dan perubahan tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, diperlukan analisis empiris untuk menguji sejauh mana variabel-variabel makroekonomi tersebut berperan dalam memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di tingkat provinsi.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh inflasi, upah minimum provinsi, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum provinsi (UMP) terhadap Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia
4. Menganalisis pengaruh inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini dapat memperkaya literatur dan referensi akademik mengenai faktor-faktor makroekonomi yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka

di Indonesia, khususnya dengan pendekatan data panel antarprovinsi. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengaruh inflasi, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Dengan mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh signifikan, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi dalam upaya memperluas kesempatan kerja.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.1.1 Konsep Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan permasalahan makroekonomi yang mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Menurut Sukirno (2008), pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan, bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Definisi ini menegaskan bahwa pengangguran mencakup individu yang tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi tersebut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja serta menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dan efektivitas pembangunan ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti melemahnya aktivitas ekonomi, penerapan teknologi baru yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja, maupun penurunan kinerja di sektor industri tertentu (Astari, 2019).

2.1.1.2 Teori Pengangguran

1. Teori Klasik

Teori klasik merupakan salah satu teori awal dalam ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Jean-Baptiste Say. Teori ini berpendapat bahwa perekonomian pada dasarnya akan selalu menuju kondisi keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) apabila mekanisme pasar berjalan secara bebas tanpa campur tangan pemerintah.

Salah satu dasar utama dalam teori klasik adalah Hukum Say (*Say's Law*) yang menyatakan bahwa “penawaran menciptakan permintaannya sendiri”. Artinya, setiap proses produksi barang dan jasa akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menyerap seluruh hasil produksi tersebut. Dengan demikian, tidak akan terjadi kekurangan permintaan agregat dalam perekonomian, sehingga seluruh faktor produksi, termasuk tenaga kerja, dapat terserap secara optimal (Argoti & Samuleson, 2022).

Dalam perspektif klasik, pasar tenaga kerja beroperasi berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan, sedangkan penawaran tenaga kerja berasal dari individu atau rumah tangga. Tingkat upah dipandang sebagai harga tenaga kerja yang bersifat fleksibel. Apabila terjadi pengangguran, hal tersebut disebabkan oleh tingkat upah yang berada di atas tingkat keseimbangan pasar (*equilibrium wage*). Oleh karena itu, penyesuaian berupa penurunan upah akan mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan, sehingga keseimbangan pasar tenaga kerja dapat tercapai kembali (Hall, 1975).

Lebih lanjut, teori klasik mengelompokkan pengangguran sebagai fenomena yang bersifat sementara dan tidak struktural. Pengangguran yang terjadi umumnya berupa pengangguran sukarela (*voluntary unemployment*), yaitu kondisi ketika individu memilih untuk tidak bekerja karena tingkat upah yang ditawarkan tidak sesuai dengan preferensinya. Selain itu, terdapat pula pengangguran friksional (*frictional unemployment*) yang timbul akibat proses perpindahan pekerjaan atau

pencarian kerja. Kedua jenis pengangguran ini dianggap sebagai bagian alami dari dinamika pasar tenaga kerja.

Namun demikian, teori klasik juga mengakui bahwa pengangguran dapat terjadi apabila terdapat hambatan dalam mekanisme pasar tenaga kerja. Hambatan tersebut meliputi intervensi pemerintah, seperti penetapan upah minimum, keberadaan serikat pekerja, serta kekakuan upah (*wage rigidity*) yang menghambat proses penyesuaian. Kondisi ini menyebabkan tingkat upah tidak dapat turun menuju titik keseimbangan, sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap menjadi lebih rendah dari kondisi kesempatan kerja penuh.

Secara keseluruhan, teori klasik memandang pengangguran sebagai fenomena sementara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar, khususnya melalui fleksibilitas upah. Namun, dalam konteks perekonomian modern, teori ini tetap perlu dipadukan dengan pendekatan lain untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pengangguran.

2. Teori Keynes

Teori Keynesian yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes berpendapat bahwa dalam kenyataannya, perekonomian dapat mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan, termasuk tingginya tingkat pengangguran. Dalam karyanya, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Keynes menjelaskan bahwa pengangguran tidak selalu bersifat sementara, melainkan dapat terjadi dalam jangka panjang apabila tidak ada intervensi yang memadai (Keynes, 1936).

Menurut pendekatan Keynesian, penyebab utama pengangguran adalah kurangnya permintaan agregat (*aggregate demand*) dalam perekonomian. Permintaan agregat terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Ketika permintaan agregat menurun, perusahaan akan mengurangi produksi sehingga kebutuhan tenaga kerja juga berkurang. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pengangguran meskipun tenaga kerja bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku (Mankiw, 2018).

Berbeda dengan pandangan klasik, Keynes menolak asumsi bahwa upah bersifat sepenuhnya fleksibel. Ia menekankan adanya kekakuan upah (*wage rigidity*), terutama dalam jangka pendek. Kekakuan ini dapat disebabkan oleh kontrak kerja, kebijakan upah minimum, serta faktor sosial dan kelembagaan. Akibatnya, penurunan upah tidak selalu mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, bahkan dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memperburuk permintaan agregat.

Dalam kerangka Keynesian, pengangguran yang terjadi umumnya bersifat involunter (*involuntary unemployment*), yaitu kondisi ketika individu bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku, tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran bukan semata-mata disebabkan oleh pilihan individu, melainkan oleh lemahnya permintaan dalam perekonomian.

Untuk mengatasi pengangguran, teori Keynesian menekankan pentingnya peran aktif pemerintah. Kebijakan fiskal, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak, dapat digunakan untuk mendorong permintaan agregat. Selain itu, kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga juga dapat merangsang investasi dan konsumsi. Peningkatan permintaan agregat ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, teori Keynesian memandang pengangguran sebagai masalah makroekonomi yang serius dan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dianggap diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran.

2.1.2 Inflasi

2.1.2.1 Konsep Inflasi

Inflasi merupakan kondisi ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam suatu periode tertentu, yang mencerminkan penurunan daya beli uang dalam perekonomian. Bank Indonesia menegaskan bahwa kenaikan harga satu atau dua komoditas saja tidak dapat disebut inflasi kecuali kenaikan tersebut meluas dan memengaruhi sebagian besar harga barang dan jasa dalam perekonomian.

Secara umum, inflasi dapat bersumber dari tekanan sisi penawaran (*cost-push inflation*) maupun sisi permintaan (*demand-pull inflation*). Inflasi dari sisi penawaran terjadi ketika biaya produksi meningkat, misalnya akibat kenaikan harga bahan baku, depresiasi nilai tukar, atau kenaikan upah nominal, sehingga produsen menaikkan harga jual untuk menutupi peningkatan biaya tersebut (Afandi, 2015). Sementara itu, inflasi dari sisi permintaan terjadi ketika permintaan agregat terhadap barang dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan penawaran, sehingga mendorong kenaikan harga karena kelebihan permintaan dalam perekonomian. Kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa dinamika inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasar domestik, tetapi juga oleh faktor eksternal dan kebijakan ekonomi.

Secara teoritis, inflasi dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu:

1. ***Demand-pull inflation***, yaitu inflasi yang terjadi akibat peningkatan permintaan agregat yang melebihi kapasitas produksi.
2. ***Cost-push inflation***, yaitu inflasi yang disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku atau upah tenaga kerja.

Untuk mengukur tingkat inflasi, para ekonom umumnya menggunakan dua indikator utama, yaitu:

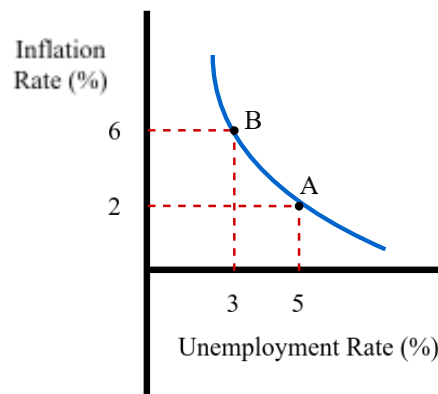
- **Indeks Harga Konsumen (IHK)** atau *Consumer Price Index (CPI)*, yang mencerminkan perubahan rata-rata harga dari sejumlah barang dan jasa konsumsi rumah tangga dalam periode tertentu.
- **GDP Deflator**, yaitu rasio antara PDB nominal dengan PDB riil yang dinyatakan dalam bentuk indeks, dan digunakan untuk mengukur perubahan harga secara keseluruhan dalam perekonomian.

2.1.2.2 Teori Inflasi (Phillips)

Teori Phillips pertama kali diperkenalkan oleh A.W. Phillips pada tahun 1958 melalui artikelnya yang berjudul “*The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom, 1861–1957.*” Dalam penelitiannya, Phillips menemukan adanya hubungan yang berlawanan arah antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah, yang kemudian dikembangkan

lebih lanjut menjadi hubungan antara pengangguran dan inflasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketika tingkat pengangguran rendah, inflasi cenderung meningkat, Sedangkan ketika pengangguran tinggi, inflasi biasanya berada pada tingkat yang lebih rendah (Phillips, 1958).

Hubungan tersebut dapat digambarkan melalui Kurva Phillips sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 6. Kurva Phillips

Sumber: (Kurniawan, 2013)

Kurva Phillips pada gambar di atas yang dikutip dari (Kurniawan, 2013) menggambarkan hubungan terbalik antara inflasi dan tingkat pengangguran. Kurva tersebut menunjukkan bahwa inflasi dipandang sebagai cerminan meningkatnya permintaan agregat dalam perekonomian. Ketika permintaan agregat naik, harga barang dan jasa terdorong meningkat. Kenaikan harga ini mendorong produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Dalam kondisi tersebut, tenaga kerja dianggap sebagai komponen utama yang dapat menambah output. Peningkatan produksi menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja bertambah sehingga kesempatan kerja meningkat dan tingkat pengangguran menurun. Dengan demikian, kurva tersebut menjelaskan bahwa kenaikan inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan agregat berkaitan dengan penurunan tingkat pengangguran.

Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh Friedman (1968) dan Phelps (1967) menjelaskan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran tidak stabil secara

permanen karena dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi masyarakat. Dalam jangka pendek, hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran masih dapat terjadi, di mana penurunan tingkat pengangguran sering diikuti oleh kenaikan inflasi. Namun, dalam jangka panjang hubungan tersebut cenderung melemah bahkan dapat menghilang. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian ekspektasi inflasi; ketika masyarakat telah memperkirakan kenaikan harga, pekerja akan menuntut kenaikan upah dan perusahaan akan menyesuaikan harga barang dan jasa. Akibatnya, inflasi tetap berlangsung tanpa diikuti penurunan tingkat pengangguran.

Apabila kebijakan ekonomi diarahkan untuk mempertahankan tingkat pengangguran di bawah tingkat pengangguran alami (*natural rate of unemployment*), Kurva Phillips jangka pendek akan bergeser ke atas, yang mencerminkan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran lebih tinggi dari tingkat alaminya, kurva dapat bergeser kebawah sehingga tekanan inflasi cenderung menurun. Pergeseran ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dan perubahan ekspektasi inflasi masyarakat berperan penting dalam menentukan posisi Kurva Phillips dalam jangka pendek, sementara dalam jangka panjang perekonomian akan kembali menuju tingkat pengangguran alaminya.

2.1.3 Upah Minimum Provinsi (UMP)

2.1.3.1 Konsep Upah Minimum Provinsi (UMP)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan serta menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup pekerja.

Dalam kerangka kebijakan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan upah minimum sebagai instrumen perlindungan bagi pekerja, khususnya mereka yang memiliki tingkat upah rendah dan posisi tawar yang relatif lemah di pasar tenaga kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang

Pengupahan, upah minimum merupakan batas terendah upah bulanan yang terdiri atas gaji pokok tanpa tunjangan atau gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang ditetapkan oleh gubernur sebagai bentuk perlindungan dasar bagi pekerja.

Upah minimum pada tingkat provinsi dikenal sebagai Upah Minimum Provinsi (UMP), yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi. Penetapan UMP dilakukan setiap tahun oleh gubernur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan lebih tinggi dibandingkan UMP sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi lokal yang lebih spesifik.

Pada periode sebelum perubahan regulasi, penetapan upah minimum mengacu pada formula berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$$

di mana:

UM_n : Upah Minimum tahun berjalan

UM_t : Upah Minimum tahun sebelumnya

% Δ PDB_t : Tingkat pertumbuhan PDB

Formula tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian upah minimum ditentukan berdasarkan kombinasi antara tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa yang berpengaruh terhadap daya beli pekerja, sehingga kenaikan upah diperlukan untuk menjaga tingkat kesejahteraan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi yang secara teoritis meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membayar upah.

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka kenaikan upah minimum yang ditetapkan juga cenderung lebih besar. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang melambat dan inflasi rendah, penyesuaian upah minimum menjadi lebih terbatas. Formula ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Namun demikian, pendekatan berbasis formula tersebut memiliki keterbatasan karena belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil pasar tenaga kerja, seperti tingkat pengangguran, produktivitas tenaga kerja, serta perbedaan struktur ekonomi antar daerah. Oleh karena itu, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, penetapan upah minimum tidak hanya didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan indikator ketenagakerjaan lainnya.

Selain faktor makroekonomi, penentuan upah minimum juga memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu standar kebutuhan hidup seorang pekerja lajang selama satu bulan yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta kebutuhan dasar lainnya. KHL menjadi dasar normatif dalam memastikan bahwa upah minimum tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga menjamin kelayakan hidup pekerja.

2.1.3.2 Teori Upah Minimum Provinsi

1. Teori Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi tenaga kerja yang menjelaskan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan mampu dipekerjakan oleh perusahaan pada tingkat upah tertentu. Permintaan tenaga kerja bersifat *derived demand*, yaitu permintaan yang muncul sebagai konsekuensi dari permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, tenaga kerja tidak diminta secara langsung, melainkan sebagai faktor produksi untuk menghasilkan output. Oleh karena itu, perubahan dalam permintaan terhadap output akan memengaruhi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, perusahaan cenderung meningkatkan penggunaan tenaga kerja untuk memenuhi peningkatan produksi tersebut (Borjas, 2016).

Dalam teori permintaan tenaga kerja, perusahaan diasumsikan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan akan melakukan penyesuaian terhadap penggunaan faktor-faktor produksi, termasuk tenaga kerja dan modal. Menurut Borjas (2016), keuntungan perusahaan dapat

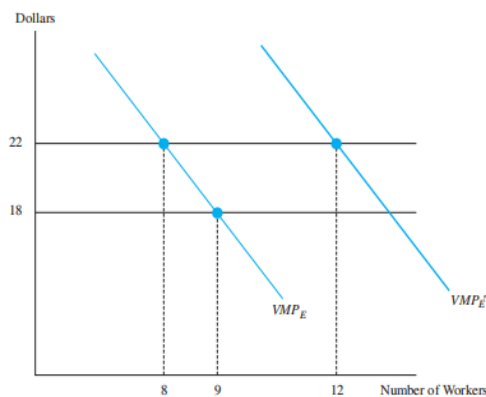
dinyatakan sebagai selisih antara penerimaan dan biaya produksi, yang secara sederhana dirumuskan sebagai:

$$\text{Keuntungan} = pQ - wE - rK$$

di mana p merupakan harga output, Q adalah jumlah output yang dihasilkan, wE menunjukkan biaya tenaga kerja (upah), dan rK merupakan biaya penggunaan modal. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, perusahaan dianggap sebagai *price taker*, yaitu tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga output maupun harga input, termasuk tingkat upah. Oleh karena itu, perusahaan akan menentukan kombinasi penggunaan tenaga kerja dan modal secara optimal guna mencapai tingkat keuntungan maksimum, dengan asumsi bahwa harga output dan upah bersifat konstan.

Menurut Borjas (2016), permintaan tenaga kerja ditentukan oleh nilai produk marginal tenaga kerja (*Value of Marginal Product of Labor/VMP*). VMP merupakan nilai tambahan output yang dihasilkan oleh penambahan satu unit tenaga kerja, yang diperoleh dari hasil perkalian antara produk marginal tenaga kerja dengan harga output. Dengan demikian, VMP mencerminkan tambahan pendapatan yang diterima perusahaan dari mempekerjakan satu tenaga kerja tambahan, dengan asumsi faktor produksi lain seperti modal bersifat tetap.

Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan akan memaksimalkan keuntungan dengan mempekerjakan tenaga kerja hingga tingkat di mana nilai produk marginal tenaga kerja sama dengan tingkat upah. Oleh karena itu, kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek dapat digambarkan oleh kurva VMP yang memiliki kemiringan negatif, seiring dengan berlakunya hukum produk marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal product*).



Gambar 7. Kurva Permintaan Tenaga Kerja Jangka Pendek

Sumber: (Borjas, 2016)

Gambar 7 menggambarkan kurva permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Kurva permintaan tenaga kerja memiliki kemiringan (slope) negatif yang menunjukkan adanya hubungan berlawanan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan, dengan asumsi bahwa modal bersifat tetap.

Pada tingkat upah sebesar 22, perusahaan mempekerjakan sebanyak 8 tenaga kerja. Ketika tingkat upah menurun, jumlah tenaga kerja yang diminta meningkat menjadi 9 tenaga kerja. Hal ini terjadi karena berlakunya hukum produk marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal product*), di mana penambahan tenaga kerja akan menurunkan nilai produk marginal tenaga kerja.

Selain itu, apabila terjadi peningkatan harga output, kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser ke kanan, yaitu dari VMPE ke VMPE'. Pada kondisi tersebut, perusahaan akan meningkatkan produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Akibatnya, pada tingkat upah yang sama sebesar 22, peningkatan harga output akan mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja dari 8 tenaga kerja menjadi 12 tenaga kerja (Borjas, 2016).

2. Teori Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada berbagai tingkat upah dalam jangka waktu tertentu (Maghfirah & Zulham, 2016). Penawaran tenaga kerja mencerminkan hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan di pasar kerja.

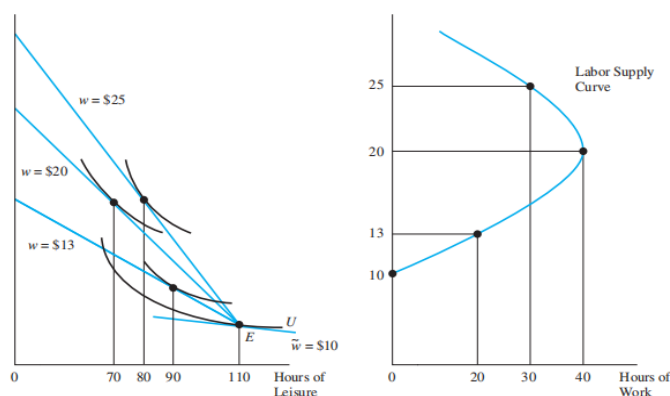
Dalam teori neoklasik, penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Teori ini mengasumsikan bahwa jumlah tenaga kerja dan tingkat keterampilan bersifat tetap. Kenaikan tingkat upah akan mendorong individu untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dalam memasuki pasar tenaga kerja karena adanya insentif berupa pendapatan yang lebih tinggi (Triani & Andrisani, 2019).

Perubahan penawaran tenaga kerja sebagai respons terhadap perubahan upah dapat dijelaskan melalui dua efek utama, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Menurut (Becker, 1976), kenaikan upah meningkatkan nilai relatif waktu kerja dibandingkan waktu luang (*leisure*). Efek substitusi terjadi ketika kenaikan upah mendorong individu untuk meningkatkan jam kerja karena waktu luang menjadi lebih mahal. Sebaliknya, efek pendapatan menunjukkan bahwa kenaikan upah meningkatkan kesejahteraan individu sehingga mendorong mereka untuk mengurangi jam kerja dan lebih banyak menikmati waktu luang.

Hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan digambarkan melalui kurva penawaran tenaga kerja. Kurva ini menunjukkan bagaimana individu menentukan pilihan antara bekerja dan waktu luang dalam merespons perubahan tingkat upah. Individu akan memasuki pasar tenaga kerja apabila tingkat upah yang ditawarkan melebihi upah reservasi. Pada tahap awal, kurva penawaran tenaga kerja memiliki kemiringan positif, yang menunjukkan bahwa kenaikan upah meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Namun, pada tingkat upah yang lebih tinggi, efek pendapatan dapat menjadi lebih dominan sehingga menyebabkan penurunan jumlah jam kerja. Oleh karena itu, kurva penawaran tenaga kerja berbentuk melengkung ke belakang (*backward-bending labor supply curve*) (Borjas, 2016).

Gambar 8. menunjukkan kurva penawaran tenaga kerja yang berbentuk melengkung ke belakang (*backward-bending labor supply curve*). Pada tingkat upah sebesar 10, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan adalah nol, yang menunjukkan bahwa individu memilih untuk tidak bekerja dan sepenuhnya mengalokasikan waktunya untuk waktu luang, yaitu sebesar 110 jam.

Ketika tingkat upah meningkat menjadi 13, individu mulai memasuki pasar tenaga kerja dengan mengorbankan sebagian waktu luangnya. Pada kondisi ini, individu mengalokasikan sekitar 20 jam untuk bekerja, sehingga waktu luang yang dimiliki berkurang menjadi 90 jam. Hal ini mencerminkan dominasi efek substitusi, di mana kenaikan upah mendorong individu untuk meningkatkan jam kerja.



Gambar 8. Kurva Penawaran Tenaga Kerja

Sumber : (Borjas, 2016)

Selanjutnya, ketika tingkat upah meningkat menjadi 20, jumlah jam kerja bertambah menjadi 40 jam, sedangkan waktu luang berkurang menjadi 70 jam. Namun, ketika tingkat upah meningkat lebih tinggi menjadi 25, individu justru mengurangi jam kerja menjadi 30 jam dan meningkatkan waktu luang menjadi 80 jam.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat upah yang lebih tinggi, efek pendapatan mulai mendominasi efek substitusi. Akibatnya, kenaikan upah tidak lagi mendorong peningkatan jam kerja, melainkan justru menyebabkan penurunan jumlah jam kerja. Oleh karena itu, kurva penawaran tenaga kerja berbentuk melengkung ke belakang, yang mencerminkan perubahan perilaku individu dalam merespons kenaikan tingkat upah (Borjas, 2016).

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses di mana kapasitas produksi suatu perekonomian meningkat, yang ditunjukkan oleh naiknya output barang dan jasa dalam bentuk riil selama periode waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, karena indikator ini menunjukkan peningkatan produksi yang telah disesuaikan dengan perubahan harga (Todaro & Smith, 2020). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan pendapatan dan meningkatkan aktivitas ekonomi dari waktu ke waktu.

Dalam konteks makroekonomi, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh peningkatan faktor-faktor produksi, seperti akumulasi modal, pertumbuhan sumber daya manusia, serta kemajuan teknologi. Selain itu, kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan keterampilan juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa perekonomian dapat menggunakan sumber daya secara lebih efisien untuk menciptakan hasil produksi yang lebih besar, sehingga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi (Okun)

Hukum Okun (*Okun's Law*) merupakan konsep dalam ekonomi makro yang menjelaskan hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Okun melalui karyanya, *Potential GNP: Its Measurement and Significance* (1962). Inti dari Hukum Okun adalah adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran cenderung menurun, sedangkan ketika pertumbuhan ekonomi melambat atau mengalami kontraksi, tingkat pengangguran cenderung meningkat.

Dalam konteks pasar tenaga kerja, perubahan tingkat pengangguran berkaitan erat dengan dinamika aktivitas produksi. Ketika perekonomian mengalami pertumbuhan, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat sehingga perusahaan

memperluas kapasitas produksi dan menambah tenaga kerja. Kondisi ini akan meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi melemah, aktivitas produksi menurun dan perusahaan cenderung mengurangi penggunaan tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran meningkat.

Hasil studi Arthur Okun menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 poin persentase tingkat pengangguran berkaitan dengan penurunan sekitar 2 persen Produk Domestik Bruto (GDP). Temuan ini menegaskan adanya keterkaitan yang kuat antara kinerja perekonomian dan kondisi pasar tenaga kerja. Dengan demikian, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran cenderung menurun, dan sebaliknya. Konsep ini juga mencerminkan adanya hubungan terbalik (*trade-off*) antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, di mana kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berpotensi menurunkan tingkat pengangguran. Namun demikian, besaran hubungan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi, struktur pasar tenaga kerja, serta karakteristik masing-masing negara.

Secara matematis, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan tingkat pengangguran dalam Hukum Okun dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\Delta Y = -a(\Delta U)$$

di mana:

ΔY : perubahan pertumbuhan ekonomi

ΔU : perubahan tingkat pengangguran

a : konstanta yang menunjukkan sensitivitas pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan pengangguran

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa ketika tingkat pengangguran menurun (ΔU bernilai negatif), pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat (ΔY bernilai positif), dan sebaliknya. Dengan demikian, Hukum Okun menegaskan adanya hubungan terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran,

sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran.

2.2 Keterkaitan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Inflasi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Hubungan antara inflasi dan pengangguran dijelaskan oleh konsep kurva Phillips, sebuah konsep yang dikembangkan oleh A.W. Phillips. Teori ini menggambarkan hubungan antara perkembangan harga dalam perekonomian dan kondisi pasar tenaga kerja. Kurva Phillips menunjukkan bahwa perubahan tingkat inflasi disertai dengan perubahan tingkat pengangguran, sehingga muncul konsep trade-off jangka pendek antara keduanya.

Secara umum, tingkat pengangguran cenderung turun ketika inflasi meningkat. Hal ini terjadi karena kenaikan harga barang dan jasa biasanya dikaitkan dengan peningkatan permintaan agregat dan aktivitas produksi, yang mendorong perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak karyawan. Sebaliknya, aktivitas ekonomi cenderung melambat ketika inflasi rendah atau turun, produksi menurun, dan permintaan tenaga kerja berkurang, yang menyebabkan peningkatan pengangguran. Namun, hubungan ini tidak selalu stabil dalam jangka panjang, karena dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi masyarakat, kebijakan ekonomi, dan kondisi struktural pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, trade-off antara inflasi dan pengangguran dapat melemah atau bahkan hilang sepenuhnya dalam jangka panjang.

2.2.2 Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja. Secara teoritis, kenaikan UMP yang berada di atas tingkat keseimbangan pasar akan meningkatkan biaya tenaga kerja bagi perusahaan. Hal ini dapat mendorong perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran terbuka.

Namun, di sisi lain, kenaikan UMP juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong permintaan agregat. Peningkatan permintaan tersebut dapat

memicu pertumbuhan produksi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga berpotensi menurunkan pengangguran.

Dengan demikian, hubungan antara UMP dan tingkat pengangguran terbuka bersifat tidak pasti, tergantung pada kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan dalam merespons perubahan upah.

2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Hukum Okun, yang diperkenalkan pada tahun 1962 oleh ekonom Amerika Arthur Okun, menjelaskan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Okun menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen dalam tingkat pengangguran dikaitkan dengan penurunan sekitar 2 persen dalam produk domestik bruto (PDB). Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran cenderung turun ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, sementara biasanya naik ketika pertumbuhan ekonomi melambat atau menyusut.

Hubungan tersebut mencerminkan keterkaitan antara kinerja perekonomian dan kondisi pasar tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Sebaliknya, saat pertumbuhan ekonomi melemah, aktivitas produksi menurun dan permintaan tenaga kerja berkurang, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjukkan peningkatan output nasional, tetapi juga mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja dan menekan tingkat pengangguran.

2.3 Studi Empiris

Berikut sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan analisis yang akan dilakukan pada studi ini.

Table 1. Penelitian Terdahulu

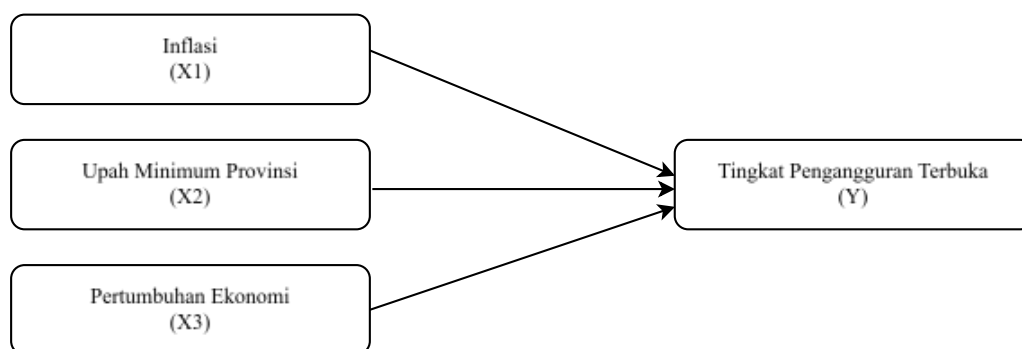
No	Judul dan Penulis	Metode/Variabel	Hasil Penelitian
1	“Penerapan <i>Autoregressive Distributed Lag</i> Dalam Memodelkan Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan <i>FDI</i> Terhadap Pengangguran Di Indonesia” Jumhur (2020)	Variabel : Pengangguran, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing Langsung. Metode : Analisis <i>Autoregressive Distributed Lag</i> (ARDL).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka pendek, namun tidak signifikan dalam jangka panjang. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal asing terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2	“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di provinsi Banten tahun 2012-2023” Maura Afifah Widhia Hanuun (2024)	Variabel : Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia. Metode : Regresi panel dinamis menggunakan model <i>SYS-GMM</i> Blundell Bond.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Pengangguran terbuka. Sebaliknya, jumlah industri dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.
3	“Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Upah Minimum di Provinsi Jawa Barat” Mohammad Afrizal Lazuardi, Dwi Budi Santoso (2024)	Variabel : Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi. Metode : Regresi data panel dinamis <i>Generalized Method of Moments</i> (GMM)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat pengangguran terbuka, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

No	Judul dan Penulis	Metode/Variabel	Hasil Penelitian
4	<p>“Pengaruh Inflasi dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia”</p> <p>Hidayah, Aji (2022)</p>	<p>Variabel : Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi, Investasi (PMA).</p> <p>Metode : Regresi linier berganda dengan metode OLS</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Sebaliknya, variabel investasi yang diprosikan melalui Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.</p>
5	<p><i>"Analysis Of The Socio-Economic Effect On Unemployment In Gorontalo Province"</i></p> <p>Muhamad Zikri Zam-Zama, Syarwani Canonb, Ivan Rahmat Santoso (2022)</p>	<p>Variabel : <i>Population Growth, Economic Growth, Inflation, Human Development Index, Unemployment</i></p> <p>Metode : Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran, sedangkan pertumbuhan penduduk dan inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan.</p>
6	<p>“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Inflasi Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Barat”</p> <p>Windy Alifah Sahara, Nelvia Iryani (2023)</p>	<p>Variabel : Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Inflasi, Upah Minimum Provinsi (UMP).</p> <p>Metode : <i>Ordinary Least Square (OLS)</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat. sedangkan jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran alur berpikir peneliti dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, serta fenomena yang terjadi. Kerangka ini disusun untuk menunjukkan bagaimana variabel independen diasumsikan memengaruhi variabel dependen secara teoritis.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dikembangkan untuk menjelaskan pengaruh inflasi, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.



Gambar 9. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dijelaskan bahwa inflasi, upah minimum provinsi (UMP), dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor-faktor yang secara teoritis memengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT). Inflasi memengaruhi pengangguran melalui perubahan aktivitas ekonomi dan dinamika permintaan agregat, yang berdampak pada permintaan tenaga kerja. Upah minimum provinsi memengaruhi pengangguran melalui mekanisme pasar tenaga kerja, di mana perubahan tingkat upah dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan produksi dan aktivitas produksi yang berpotensi memperluas peluang kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Dengan demikian, diasumsikan bahwa ketiga variabel independen ini memiliki pengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2.4 Rumusan Hipotesis

Hipotesis adalah prediksi awal yang dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut:

H₁: Diduga bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

H₂: Diduga bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

H₃: Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada pengujian teori dan hipotesis melalui pengukuran variabel dalam bentuk data numerik yang dianalisis menggunakan teknik statistik (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara objektif, dan terukur (Creswell, 2014). Penelitian kuantitatif memiliki karakteristik penggunaan data berbentuk angka, analisis statistik, serta prosedur penelitian yang terstruktur sejak tahap perencanaan hingga penarikan kesimpulan. Menurut Arikunto (2013), data yang dikumpulkan diolah secara statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat empiris, sehingga temuan penelitian didasarkan pada bukti yang terukur dan sistematis.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section* yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2018–2023.

Table 2. Variabel, Simbol, Satuan dan Sumber Data

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Persen (%)	BPS
Inflasi	INF	Persen (%)	BPS
Upah Minimum Provinsi	UMP	Rupiah	BPS
Pertumbuhan Ekonomi	PE	Persen (%)	BPS

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana setiap variabel dalam penelitian ini diukur dan diinterpretasikan berdasarkan data yang digunakan. Definisi operasional ini dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami makna dan batasan dari setiap variabel yang dianalisis. Berikut adalah definisi dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase dari total angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan tetapi secara aktif mencari pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan situasi ketenagakerjaan di suatu wilayah dan menunjukkan seberapa efektif pasar tenaga kerja berfungsi. Dalam penelitian ini, data TPT berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diukur dalam bentuk persen (%).

2) Inflasi

Inflasi dalam penelitian ini diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Secara operasional, inflasi dihitung berdasarkan persentase perubahan IHK dari periode sebelumnya ke periode berjalan yang mencerminkan kenaikan umum harga barang dan jasa, dan dinyatakan dalam bentuk persen (%).

3) Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam penelitian ini diukur berdasarkan besaran UMP yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta dihitung dalam bentuk rupiah per bulan (Rp/bulan).

4) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur berdasarkan persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam bentuk persen (%).

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel dinamis dengan bantuan perangkat lunak Stata 17. Metode estimasi yang digunakan adalah *Generalized Method of Moments* (GMM). Pendekatan data panel dinamis digunakan karena variabel dependen, yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT), bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh nilai tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka pada tahun berjalan dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka tahun sebelumnya (TPT_{it-1}).

Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TPT = f(INF, UMP, PE)$$

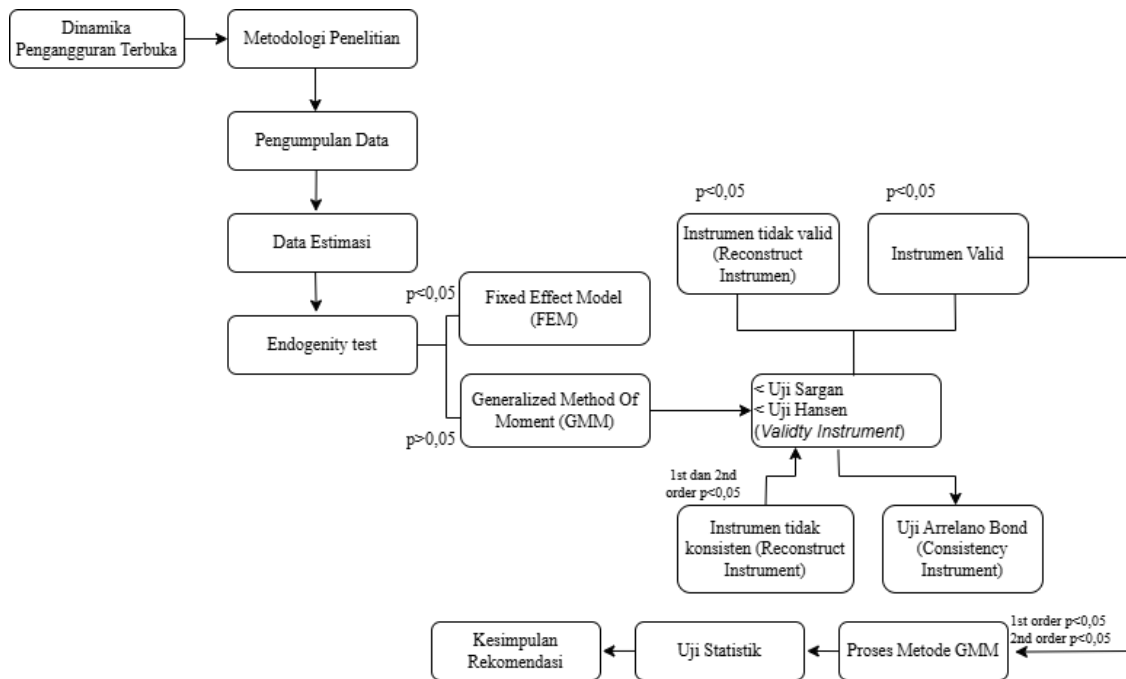
Model tersebut selanjutnya dinyatakan kembali dalam bentuk spesifikasi berikut:

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 TPT_{it-1} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 UMP_{it} + \beta_4 PE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

TPT_{it}	= Tingkat Pengangguran Terbuka tahun t
TPT_{it-1}	= Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun sebelumnya
INF_{it}	= Inflasi (Persen)
UMP_{it}	= Upah Minimum Provinsi (Rupiah)
PE_{it}	= Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
i	= Jumlah data <i>cross section</i>
t	= Jumlah data <i>time series</i>
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \beta_4$	= Koefisien Regresi
ε_{it}	= <i>Error Term</i>

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan diagram alur berikut:



Gambar 10. Tahapan Analisis Data

3.5 Uji Diagnostik

Uji diagnostik merupakan langkah pertama dalam menilai kelayakan data dan model regresi sebelum dilakukan estimasi lebih lanjut. Dalam penelitian ini, uji diagnostik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Meskipun metode estimasi yang digunakan adalah Generalized Method of Moments (GMM), uji diagnostik tetap diperlukan untuk mengevaluasi kondisi awal data dan model, serta mengidentifikasi potensi bias dalam data atau parameter estimasi.

Jika hasil uji menunjukkan pelanggaran serius terhadap asumsi klasik, metode Ordinary Least Squares (OLS) tidak lagi dapat memberikan estimasi yang bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) (Susanti, 2025). Dalam kondisi ini, penggunaan metode GMM merupakan alternatif yang lebih tepat, karena metode ini dikembangkan khusus untuk mengatasi masalah seperti endogenitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data, khususnya residual dalam model regresi, terdistribusi secara normal. Uji ini penting untuk memastikan bahwa asumsi klasik analisis regresi terpenuhi. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode skewness dan kurtosis, yang digunakan untuk menilai bentuk distribusi data.

Kriteria untuk menentukan normalitas didasarkan pada nilai statistik untuk skewness dan kurtosis. Menurut Ananta et al. (2023), data dianggap terdistribusi secara normal jika nilai skewness berada dalam kisaran -2 hingga $+2$. Selain itu, Garson (2012) menyatakan bahwa nilai skewness dan kurtosis dalam kisaran -2 hingga $+2$ menunjukkan distribusi data yang normal, sedangkan khusus untuk kurtosis, kisaran yang lebih besar, yaitu -3 hingga $+3$, masih dapat diterima sebagai indikasi normalitas data. Jika nilai skewness dan kurtosis setiap variabel berada dalam batas toleransi ini, dapat disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi hubungan linier yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolinearitas, karena korelasi yang tinggi antara variabel independen dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi yang tidak stabil dan tidak efisien, sehingga hasil analisis menjadi tidak akurat.

Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Uji ini digunakan untuk menilai derajat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Kriteria yang digunakan dalam uji multikolinearitas dengan metode VIF adalah sebagai berikut (Murwiati & Zulkarnain, 2023):

- Jika nilai VIF > 10 , model regresi menunjukkan multikolinearitas.
- Jika nilai VIF < 10 , model regresi tidak menunjukkan multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah varians residual dalam model regresi konstan (homoskedastisitas) atau tidak konstan (heteroskedastisitas). Keputusan dalam uji ini didasarkan pada nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, model regresi dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari atau sama dengan 0,05, model regresi menunjukkan heteroskedastisitas. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

- H_0 : Tidak ada heteroskedastisitas (probabilitas $> 0,05$)
- H_a : Terdapat Heteroskedastisitas (probabilitas $\leq 0,05$)

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menentukan apakah dalam model regresi linier terdapat hubungan antara residual periode saat ini (t) dan residu periode sebelumnya ($t-1$). Autokorelasi biasanya terjadi pada data runtut waktu karena observasi antar periode saling terkait, sehingga residu tidak independen. Hipotesis yang diuji dalam uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

- H_0 : Tidak terjadi autokorelasi (probabilitas statistik $F > 0,05$)
- H_a : Terjadi autokorelasi (probabilitas statistik $F < 0,05$)

Keputusan didasarkan pada nilai probabilitas statistik F . Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, H_0 diterima, yang berarti bahwa model regresi tidak memiliki autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, H_0 ditolak dan model regresi dinyatakan sebagai autokorelasi.

3.6 Uji Stasioneritas (*Unit Root Test*)

Uji stasioneritas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian bersifat stasioner atau tidak. Data dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata, varians, dan kovariansnya relatif konstan sepanjang waktu. Sebaliknya, data yang tidak stasioner memiliki karakteristik statistik yang berubah seiring waktu. Dalam analisis ekonometrika, penggunaan data yang tidak stasioner dapat menyebabkan terjadinya *spurious regression*, yaitu hubungan semu antar variabel

yang secara statistik tampak signifikan tetapi tidak memiliki makna ekonomi yang sebenarnya (Gujarati & Porter, 2009).

Pada penelitian yang menggunakan data panel, pengujian stasioneritas bertujuan untuk memastikan bahwa variabel yang digunakan dalam model tidak mengandung *unit root*. Apabila variabel memiliki *unit root*, maka proses data tersebut bersifat tidak stasioner dan dapat menyebabkan hasil estimasi model menjadi tidak konsisten serta sulit diinterpretasikan secara ekonomis (Wooldridge, 2010).

Pengujian stasioneritas dilakukan terhadap setiap variabel penelitian baik pada tingkat level maupun pada tingkat perbedaan pertama (*first difference*). Pengujian pada tingkat level bertujuan untuk mengetahui apakah variabel sudah stasioner pada bentuk aslinya. Apabila variabel tidak stasioner pada tingkat level, maka dilakukan transformasi data pada tingkat perbedaan pertama untuk melihat apakah variabel tersebut menjadi stasioner setelah dilakukan diferensiasi.

Transformasi pada tingkat perbedaan pertama dilakukan dengan mengurangi nilai variabel pada periode saat ini dengan nilai variabel pada periode sebelumnya. Apabila variabel menjadi stasioner setelah dilakukan diferensiasi pertama, maka variabel tersebut dikatakan terintegrasi pada orde satu atau $I(1)$. Sebaliknya, apabila variabel telah stasioner pada tingkat level, maka variabel tersebut dikatakan terintegrasi pada orde nol atau $I(0)$ (Greene, 2012).

Pengujian stasioneritas dalam penelitian ini dilakukan sebelum estimasi model menggunakan metode Generalized Method of Moments. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa variabel yang digunakan dalam model memenuhi syarat analisis ekonometrika sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara valid.

3.6 Uji Validitas Instrumen

Dalam estimasi model panel dinamis dengan metode *Generalized Method of Moments* (GMM), instrumen digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas yang muncul akibat korelasi antara variabel independen dan error term. Jika endogenitas tidak ditangani dengan baik, maka hasil estimasi dapat menjadi bias

dan tidak konsisten. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan harus valid, yaitu tidak berkorelasi dengan residual serta hanya memengaruhi variabel dependen melalui variabel penjelas. Validitas instrumen umumnya diuji menggunakan uji Sargan dan uji Hansen yang menitikberatkan pada *overidentifying restrictions*, serta uji Arellano–Bond yang mendeteksi ada tidaknya korelasi serial pada error. Ketiga uji tersebut saling melengkapi sehingga memberikan landasan yang kuat dalam menilai keandalan hasil estimasi GMM.

a. Uji Hansen dan Uji Sargan

Uji Sargan dan uji Hansen merupakan dua metode yang digunakan dalam kerangka *Generalized Method of Moments* (GMM) untuk menilai validitas instrumen melalui *overidentifying restrictions*. Uji Sargan yang diperkenalkan oleh Sargan (1958) dilakukan dengan asumsi bahwa error term bersifat homoskedastis, sedangkan uji Hansen yang dikembangkan oleh Hansen (1982) merupakan penyempurnaan yang lebih robust terhadap heteroskedastisitas.

Hipotesis yang diuji adalah:

- H_0 : *conditions of moment* valid, artinya instrumen yang digunakan tidak berkorelasi dengan residual
- H_a : *conditions of moment* tidak valid, artinya instrumen yang digunakan berkorelasi dengan residual

Keduanya memiliki hipotesis nol bahwa instrumen yang digunakan valid, dengan statistik uji mengikuti distribusi Chi-kuadrat. Penentuan validitas instrumen dilakukan berdasarkan nilai probabilitas (*p-value*), di mana nilai di atas 0,05 menunjukkan instrumen dapat diterima sebagai valid. Uji Sargan unggul karena kesederhanaannya, tetapi lemah dalam menghadapi heteroskedastisitas, sedangkan uji Hansen lebih andal pada data empiris meski berpotensi bermasalah ketika jumlah instrumen terlalu banyak (*instrument proliferation*). Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam memberikan kepastian atas validitas instrumen yang digunakan dalam estimasi GMM.

b. Uji Arellano Bond

Uji Arellano-Bond (AR) bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan autokorelasi serial dalam komponen error, terutama pada selisih pertama dari residual. Dalam penerapan model GMM, salah satu asumsi penting adalah tidak adanya autokorelasi serial pada residual lag ke-dua. Hal ini dikarenakan autokorelasi pada tingkat tersebut dapat menyebabkan instrumen yang menggunakan variabel terdiferensiasi menjadi tidak sah. Oleh karena itu, uji Arellano-Bond dilakukan pada dua tingkat lag, yakni AR(1) dan AR(2). Umumnya, hasil AR(1) menunjukkan signifikansi, sementara AR(2) diharapkan tidak signifikan agar model GMM dinyatakan valid.

Uji Arellano-Bond dilakukan untuk menguji adanya autokorelasi pada selisih pertama dari residual, baik pada ordo pertama (AR(1)) maupun ordo kedua (AR(2)). Jika nilai probabilitas AR(1) kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak dan mengindikasikan adanya autokorelasi pada lag pertama, yang masih dianggap dapat diterima dalam model GMM. Sebaliknya, jika p-value AR(2) lebih dari 0,05, maka hipotesis nol diterima, menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada lag kedua, sehingga instrumen yang digunakan dinilai valid. Namun, apabila AR(2) signifikan, maka validitas instrumen dipertanyakan dan keandalan estimasi model menjadi tidak kuat.

3.7 Generalized Method of Moment (GMM)

Penelitian ini menggunakan analisis regresi panel data dinamis dengan metode *Generalized Method of Moments* (GMM). Penggunaan GMM didasarkan pada potensi endogenitas, terutama karena tingkat pengangguran terbuka bersifat dinamis, di mana nilainya pada periode saat ini dipengaruhi oleh periode sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, estimator konvensional seperti OLS, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* cenderung memberikan estimasi yang bias dan tidak konsisten.

Pendekatan yang digunakan adalah *Difference* GMM, yaitu dengan mentransformasikan model ke dalam bentuk selisih pertama untuk menghilangkan efek individual yang tidak teramati (μ_i). Melalui pendekatan ini, variabel dependen terlag dan variabel independen yang berpotensi endogen diinstrumentasikan

menggunakan nilai lag-nya dalam level, sehingga masalah endogenitas dapat diminimalkan (Arellano & Bond, 1991).

Keunggulan utama GMM dibandingkan metode estimasi lainnya terletak pada kemampuannya mengatasi bias akibat variabel dependen terlag serta korelasi antara variabel independen dan error term. Selain itu, GMM tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu terhadap error term dan memanfaatkan instrumen internal, sehingga lebih fleksibel dan robust dalam analisis data panel dinamis (Asteriou & Hall, 2011).

Estimasi dalam penelitian ini menggunakan metode *One-Step Difference Generalized Method of Moments* (GMM). Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik data yang bersifat panel dinamis dengan potensi endogenitas, sehingga memerlukan estimator yang mampu menghasilkan estimasi yang konsisten. Selain itu, data penelitian memiliki jumlah cross section yang relatif besar dan periode waktu yang terbatas, sehingga pendekatan *Difference GMM* dinilai lebih sesuai. Penggunaan estimator one-step dipilih karena lebih stabil serta menghasilkan standar error yang lebih andal dibandingkan *two-step GMM*, serta mampu meminimalkan risiko *instrument proliferation* yang dapat memengaruhi validitas hasil estimasi (Roodman, 2009). Dengan demikian, metode ini dianggap tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.8 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan tahapan krusial dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel yang dianalisis.

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji z)

Uji signifikansi parsial (uji z) adalah metode yang digunakan untuk menguji apakah setiap variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh signifikan secara individual terhadap variabel dependen. Dalam konteks model regresi, uji ini menguji hipotesis nol (H_0), yang menyatakan bahwa koefisien regresi suatu variabel sama dengan nol (tidak memiliki pengaruh signifikan). Jika nilai probabilitas (p-value) dari uji z lebih kecil dari tingkat signifikansi (biasanya 0,05), H_0 ditolak dan

disimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini relevan dalam konteks model Generalized Method of Moments (GMM) untuk memastikan bahwa pengaruh variabel tidak hanya signifikan secara keseluruhan, tetapi juga secara parsial (Gujarati & Porter, 2009).

Hipotesis 1

- $H_0 : \beta_1 = 0$, Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.
- $H_a : \beta_1 < 0$, Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

Hipotesis 2

- $H_0 : \beta_2 = 0$, Upah minimum provinsi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.
- $H_a : \beta_2 < 0$, Upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

Hipotesis 3

- $H_0 : \beta_3 = 0$, Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.
- $H_a : \beta_3 < 0$, Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Wald)

Uji signifikansi simultan dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat pengaruh gabungan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Saat mengestimasi model panel dinamis menggunakan pendekatan metode momen umum (GMM), uji Wald digunakan sebagai pengganti uji F yang umumnya digunakan dalam regresi OLS. Uji ini digunakan untuk menilai validitas model secara keseluruhan.

Menurut Arellano & Bond (1991), uji Wald digunakan untuk menilai apakah semua koefisien regresi variabel independen secara simultan berbeda dari nol, yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara variabel-variabel dalam model.

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H₀: Semua koefisien regresi = 0 (tidak ada pengaruh simultan)

H_a: Setidaknya satu koefisien regresi $\neq 0$ (terdapat pengaruh simultan)

Jika nilai probabilitas (p-value) dari uji Wald $< 0,05$, H₀ ditolak, artinya variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari analisis serta uraian pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Inflasi terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Ini berarti bahwa perubahan tingkat inflasi selama periode penelitian belum memberikan dampak yang kuat secara statistik terhadap perubahan tingkat pengangguran di Indonesia.
2. Upah minimum provinsi (UMP) terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka, yang menunjukkan bahwa kebijakan UMP tidak menghambat penyerapan tenaga kerja.
3. Pertumbuhan ekonomi terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Ini berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, sehingga berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Inflasi (kepada Tim Pengendali Inflasi) Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, pengendalian inflasi tetap menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, Tim Pengendali

Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diharapkan dapat terus menjaga kestabilan harga, terutama pada komoditas pangan strategis yang sangat memengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu, perlu adanya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan yang terintegrasi, seperti operasi pasar, penguatan distribusi, dan pengendalian pasokan. Stabilitas inflasi yang terjaga akan menciptakan kepastian ekonomi bagi pelaku usaha sehingga dapat mendukung iklim investasi dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

2. Upah Minimum Provinsi (UMP) Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa UMP berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan pengupahan secara hati-hati dan seimbang. Penetapan UMP sebaiknya mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan dunia usaha agar tidak menimbulkan dampak negatif berupa pengurangan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan keterampilan, sehingga kenaikan upah dapat diimbangi dengan peningkatan kinerja pekerja. Dukungan kebijakan seperti insentif bagi sektor usaha, khususnya sektor padat karya dan UMKM, juga diperlukan agar perusahaan tetap mampu menyerap tenaga kerja di tengah kenaikan upah minimum.
3. Pertumbuhan Ekonomi Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, seperti industri manufaktur, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, peningkatan

investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, perlu diarahkan pada kegiatan ekonomi yang bersifat padat karya. Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi kunci agar tenaga kerja mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat secara efektif menurunkan tingkat pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. A. (2015). *Determinan Inflasi Dari Sisi Supply (Cost-Push Inflation) Di Indonesia*. 16. <https://doi.org/10.18196/jesp.2015.0047.132-145>
- Ahmad, M., & Nayan, S. (2019). *Income Inequality And Middle-Income Trap : A Panel Data Analysis On The Effects Of Economic Freedom And Democracy*. 20(2), 563–584.
- Ahmad, U. S. (2024). Dampak Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Brilliant: Journal Of Islamic Economics And Finance*, 2(2), 241–256. <https://journal.yibri.id/index.php/brijief>
- Alifah Sahara, W., & Iryani, N. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Inflasi Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Barat*. 9(1), 28–43.
- Ananta, P., Ezrien Bin Mohamad Kamal, M., & Mohamed, N. (2023). Public Spending, Corruption, And Human Development: Empirical Evidence In Middle-Income Countries. *International Conference In Technology, Humanities And Management*. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.48>
- Aprilia, F. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia periode 1992-2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 90–98.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991a). Some Tests Of Specification For Panel Data: Monte Carlo Evidence And An Application To Employment Equations. *The Review Of Economic Studies*, 58(2), 277–297. <https://doi.org/10.2307/2297968>
- Arellano, M., & Bond, S. (1991b). Some Tests Of Specification For Panel Data: Monte Carlo Evidence And An Application To Employment Equations. *The Review Of Economic Studies*, 58(2), 277–297. [https://doi.org/Oxford University Press](https://doi.org/Oxford%20University%20Press)
- Argoti, P., & Samuleson, G. (2022). Some Elements About The Classical Employment Theory And The Keynesian Perspective. *International Journal Of Future Studies Vol.*, 5(2), 170–181.

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (15th Ed.). Rineka Cipta.
- Astari, M. (2019). *Hukum Okun: Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia*. Universitas Lampung.
- Asteriou, D., & Hall, S. G. (2011). *Applied Econometrics* (2nd Editio). Palgrave Macmillan.
- Baltagi, B. H. (2013). *Econometric Analysis Of Panel Data*. John Wiley & Sons.
- Becker, G. S. (1976). *The Economic Approach To Human Behavior*. University Of Chicago Press.
- Borjas, G. J. (2016). *Labor Economics* (Seventh). Mcgraw-Hill Education.
- Bps. (2023). *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Volume 45 No. 2*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4th Ed.). Sage Publications.
- Diyanti, M. (2022). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah/Umr, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Enam Kota Sbh Jawa Tengah Tahun 2014-2020*. 1–69.
- Friedman, M. (1968). The Role Of Monetary Policy. *American Economic Review*, 58(1), 1–17.
- Garson, G. D. (2012). *Testing Statistical Assumptions*. 1–54.
- Ginting, A. (2021). Pengaruh Investasi, Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jambi. In *Stie Sakti Alam Kerinci*.
- Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis* (7th Ed.). Pearson Education.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th Ed.). Mcgraw-Hill/Irwin.
- Habibie, M. F., & Suman, A. (2025). *Analysis Of The Effects Of Economic Growth, Minimum Wages, And Education On Unemployment In Indonesia During The 2014-2023 Period*. 4(3), 770–783.
- Hadi, A. S., Riani, W., & Haryatiningsih, R. (2022). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Lpm) Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Pulau Jawa Tahun 2016-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 446–454. <https://doi.org/10.29313/Bcses.V2i2.4470>

- Hall, R. E. (1975). The Rigidity Of Wages And The Persistence Unemployment Of. *Brookings Papers On Economic Activity*, 301–349.
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties Of Generalized Method Of Moments Estimators. *Econometrica*, 50(4), 1029–1054. <https://doi.org/10.2307/1912775>
- Hanuun, M. A. W. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2012-2023*.
- Hartanto, T. B., & Masjkuri, S. . (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk , Pendidikan , Upah Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 02(1), 21–30.
- Hashmi, S. M., Khushik, A. G., Gilal, M. A., & Yongliang, Z. (2021). *The Impact Of Gdp And Its Expenditure Components On Unemployment Within Brics Countries : Evidence Of Okun ' S Law From Aggregate And Disaggregated Approaches*. 1–11. <https://doi.org/10.1177/21582440211023423>
- Herrera, R., & Carmen, M. Del. (2023). The Effects Of Minimum Wage On Unemployment For Oecd Countries : A Dynamic Fixed Effects Panel Threshold Model Perspective. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(3). <https://doi.org/10.1080/1331677x.2023.2217880>
- Hidayah, A., & Aji, T. S. (2022). Pengaruh Inflasi Dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia. *Journal Of Economis*, 2, 160–168.
- Hutagalung, S. B. L., Purba, M. L., & Purba, E. F. (2024). Menelusuri Dinamika Pengangguran Terbuka: Peran Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Inflasi Di Indonesia (2000-2021). *Ekoma: Jurnal Ekonomi ...*, 3(4), 151–166. <https://journal-nusantara.com/index.php/ekoma/article/view/3266>
- Irawati, A., Togar Laut, L., & Destiningsih, R. (2019). Pengaruh Upahminimum Provinsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2018. *Dinamic: Directory Journal Of Economic*, 2.
- Jumhur. (2020). Penerapan Autoregressive Distributed Lag Dalam Memodelkan Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Fdi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(3), 250–265. <https://doi.org/10.26418/jebik.v9i3.41332>
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory Of Employment , Interest , And Money* (P. 414). Palgrave Macmillan.
- Khairunnisa, S. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Tingkat Pengangguran*

Terbuka Di Indonesia Tahun 1987-2020. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Khoirul Lisa, M. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2021. In *Aleph*. <https://Repositorio.Ufsc.Br/Xmlui/Bitstream/Handle/123456789/167638/341506.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y%0ahttps://Repositorio.Ufsm.Br/Bitstream/Handle/1/8314/Loeblein%2cLucineiaCarla.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y%0ahttps://Antigo.Mdr.Gov.Br/Saneamento/Proees>
- Korgbeelo, C. (2025). Inflation And Unemployment Nexus In Nigeria : A Test Of The Phillips Curve. *Economics And Statistics Research*, 16(12), 1–15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17963320>
- Kurniawan, R. C. (2013). *Analisis Pengaruh Pdrb, Umk, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Malang Tahun 1980-2011*. Universitas Brawijaya.
- Lamatenggo, O., Walewangko, E. N., & Layuck, I. A. (2019). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 162–172.
- Law No. 6 Of 2023 On Job Creation (2023).
- Leasiwal, T. C., Oppier, H., Tutupoho, A., & Palloma, A. (2022). Examining The Effects Of Economic Growth On Unemployment In Indonesia. *Journal Of Social Science*, 3(5), 972–985. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i5.389>
- Mankiw, N. G. (2016). *Principles Of Macroeconomics (7th Ed.)*. Cengage Learning.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles Of Economics*. In *Cengage* (8th Ed.). Cengage Learning.
- Murwiati, A., & Zulkarnain, R. (2023). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto , Keluarga Penerima Manfaat , Dan Inflasi Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia Dengan Regresi Kuantil*. 3, 8631–8643.
- Nasir, S., Jamaludin, S., Safian, S. S. S., Malek, N. A., & Aziz, M. R. A. (2024). Revisiting Okun's Law: Evidence From Malaysia. *Information Management And Business Review*, 16(3), 551–561.
- Nurhapsari, T. (2022). *Pengaruh Investasi Pma, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi-*

Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2006 - 2020 Skripsi.

- Okun, A. M. (1962). *Potential Gnp: Its Measurement And Significance*. <https://Cowles.Yale.Edu/Sites/Default/Files/Files/Pub/D01/D0106.Pdf>
- Oyvat, C. (2023). Minimum Wage, Aggregate Demand And Employment : A Demand-Led Model Year : 2023. *Greenwich Papers In Political Economy Minimum*.
- Phelps, E. S. (1967). Phillips Curves, Expectations Of Inflation And Optimal Unemployment Over Time. *Economica*, 34(135), 254–281.
- Phillips, A. W. (1958). The Relation Between Unemployment And The Rate Of Change Of Money Wage Rates In The United Kingdom, 1861–1957. *Economica*, 25(100), 283–299. <https://doi.org/10.1111/J.1468-0335.1958.Tb00003.X>
- Putra, W. A. (2018). The Effect Of Inflation And Investment On Unemployment In The Province Of East Java , 1992-2011. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(1). <https://doi.org/10.20473/Jiet.V3i1.8062>
- Qamariyah, L., Mardianita W.P, O., & Rusgianto, Ph.D, S. (2022). Pengaruh Ipm, Investasi, Dan Ump Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Tahun 2013-2020. *Oeconomicus Journal Of Economics*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.15642/Oje.2022.7.1.1-15>
- Reina, A. M. M. (2025). The Relationship Between Inflation And Unemployment : Empirical Evidence For Colombia (2007 – 2024). *Forum For Economic And Financial Studies*, 3(3), 1–10.
- Rolim, L. (2024). Inflation, Unemployment, And Inequality: Beyond The Traditional Phillips Curve. *Review Of Political Economy*, 8259. <https://doi.org/10.1080/09538259.2024.2351827>
- Roodman, D. (2009). How To Do Xtabond2: An Introduction To Difference And System Gmm In Stata. *The Stata Journal*, 9(1), 86–136. <https://doi.org/10.1177/1536867x0900900106>
- Runturambi, A. P., Rotinsulu, T. O., & Niode, A. O. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Manado. 24(2), 97–108.
- Sargan, J. D. (1958). The Estimation Of Economic Relationships Using Instrumental Variables. *Econometrica*, 26, 393–415. <https://doi.org/10.2307/1907619>
- Simbolon, C. M., Karo, R. U. K., Daffa, D. S., & Hidayat, N. (2023). Analisis Pengaruh Ipm, Ump Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap

- Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 5(2), 451–463.
- Soeharjoto, & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 94–102. <https://doi.org/10.31294/Eco.V5i2.10070>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2008). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (3rd Ed.). Pt Rajagrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi Teori Pengantar* (3rd Ed.). Rajawali Pers.
- Susanti, S. T. (2025). *Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Indonesia*. Universitas Lampung.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Triani, M., & Andrisani, E. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Upah Terhadap Penawaran Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Geografi*, 8, 49–54.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003).
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis Of Cross Section And Panel Data* (2nd Ed.). Mit Press.